



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEASY RINA WIJAYANTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 459585

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.630.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/55 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 470.000.000
2. Tanah Seluas 91 m² di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Bangunan Seluas 225 m² di KAB / KOTA GROBOGAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah Seluas 1475 m² di KAB / KOTA PATI, WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 251.500.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI MIRAGE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MIO G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 59.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 96.511.610**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.037.511.610
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.037.511.610

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.